

Ecces

Economics, Social, and Development Studies

ANALISIS KEUNTUNGAN PETERNAK SISTEM GADUHAN DI DESA POGALAN
KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MAGELANG

Rohmat Putranto

PENINGKATAN KAPASITAS USAHA MIKRO OLAHAN PANGAN DI KABUPATEN
BANJARNEGARA, JAWA TENGAH

Istiqomah, Krisnhoe Rachmi Fitrijati, Uswatun Hasanah

PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA MELALUI INVESTASI SWASTA TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI

Andi Ika Fahraka

PENINGKATAN KUNTITAS PRODUKSI DAN KUALITAS SDM PADA KELOMPOK
KERAJINAN BAMBU DESA SOMAKATON
KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS

Sri Martini Dyah Perwita Sofiatul Khotimah

PENGARUH UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) DAN KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI
TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI SULAWESI SELATAN

Zulkifli

DETERMINAN INVESTASI PADA SEKTOR PERUMAHAN DI KOTA MAKASSAR PERIODE
2002-2013

Siradjuddin dan Nurlaela

PEMETAAN POTENSI DESA DI KABUPATEN BANYUMAS

Bambang

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Ecces

Economics, Social, and Development Studies

ANALISIS KEUNTUNGAN PETERNAK SISTEM GADUHAN DI DESA POGALAN KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MAGELANG <i>Rohmat Putranto</i>	1
PENINGKATAN KAPASITAS USAHA MIKRO OLAHAN PANGAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA, JAWA TENGAH <i>Istiqomah, Krisnhoe Rachmi Fitrijati, Uswatun Hasanah</i>	32
PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA MELALUI INVESTASI SWASTA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI <i>Andi Ika Fahrika</i>	43
PENINGKATAN KUNTITAS PRODUKSI DAN KUALITAS SDM PADA KELOMPOK KERAJINAN BAMBU DESA SOMAKATON KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS <i>Sri Martini Dyah Perwita Sofiatul Khotimah</i>	71
PENGARUH UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) DAN KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI SULAWESI SELATAN <i>Zulkifli</i>	89
DETERMINAN INVESTASI PADA SEKTOR PERUMAHAN DI KOTA MAKASSAR PERIODE 2002-2013 <i>Siradjuddin dan Nurlaela</i>	106
PEMETAAN POTENSI DESA DI KABUPATEN BANYUMAS <i>Bambang</i>	123

PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA MELALUI INVESTASI SWASTA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

Andi Ika Fahrika¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) pengaruh tingkat suku bunga terhadap investasi swasta di Indonesia, (2) pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, (3) pengaruh tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data yang dianalisis adalah data sekunder dengan *time series* (1987-2006). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model persamaan struktural (SEM) dengan menggunakan data *time series* dari tahun 1987 – 2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tingkat suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi swasta di Indonesia, (2) investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, (3) tingkat suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kata kunci: UMKM, peningkatan kapasitas produksi, pembangunan perdesaan

PENDAHULUAN

Pertumbuhan merupakan kinerja pokok perekonomian suatu negara. Usaha-usaha dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi terus dilakukan agar dapat menjaga kesinambungan pembangunan secara berkelanjutan. Tantangan ini cukup berat mengingat kondisi sektor riil yang belum sepenuhnya pulih, ditandai dengan masih rendahnya investasi dan melemahnya kinerja ekspor non-migas. (Bappenas, 2003).

Sementara itu, tingginya risiko investasi di Indonesia menyebabkan rendahnya partisipasi swasta di bidang infrastruktur. Keadaan tersebut diperburuk lagi oleh kenyataan bahwa kredibilitas mekanisme hukum di Indonesia sangat lemah. Aturan-aturan yang ada dalam mengikutsertakan pihak swasta kurang jelas dan tidak memenuhi kebutuhan pemerintah, investor swasta atau konsumen.

Dalam kaitan dengan kondisi di atas, perlu ditekankan kembali bahwa ekonomi biaya tinggi dan iklim investasi yang kurang baik adalah permasalahan utama yang dapat menyebabkan lambannya pertumbuhan ekonomi.

¹ STAIN Watampone, ikamur@yahoo.com

Tingkat suku bunga merupakan salah satu faktor penentu orang melakukan investasi dan kegiatan ekspor. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka kecenderungan untuk berinvestasi juga rendah, begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat suku bunga maka kecenderungan untuk berinvestasi juga tinggi karena tingkat suku bunga merupakan "biaya" yang harus dikeluarkan investor dalam pengambilan kredit perbankan untuk melakukan kegiatan investasi. Perkembangan tingkat suku bunga juga berfluktuasi, hal ini dapat dilihat pada data statistik yang menunjukkan bahwa tingkat suku bunga pada tahun 1997 yaitu baik tingkat suku bunga kredit modal kerja sebesar 21.98% maupun suku bunga kredit investasi yaitu sebesar 17.34%, dan pada tahun 1998 tingkat suku bunga kredit modal kerja dan suku bunga kredit investasi mengalami kenaikan yaitu tingkat suku bunga kredit modal kerja yaitu 32.27% dan tingkat suku bunga kredit investasi sebesar 23.16% dan pada tahun 1999 tingkat suku bunga kredit ini kembali mengalami penurunan yaitu tingkat suku kredit modal kerja sebesar 28.89% dan tingkat suku bunga kredit investasi sebesar 22.93%.

Tingkat suku bunga yang berfluktuasi ini tentulah dipengaruhi oleh banyak hal. Misalnya saja pemerintah menggunakan salah satu instrumen kebijakan tingkat suku bunga untuk menekan turun tingkat inflasi yang tinggi dengan mengupayakan tingkat bunga (*interest rate*) ke tingkat yang lebih tinggi, yang secara drastis hal ini akan menekan turun ekspansi kredit perbankan. Jadi dalam hubungan antara suku bunga dan pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa menurunnya suku bunga akan menaikkan PDB (atau berdampak positif terhadap pertumbuhan PDB) hanya jika pengusaha/investor yang memiliki dana untuk investasi dan masyarakat yang memiliki tabungan di bank atau lembaga keuangan lainnya merespon sesuai hipotesa. Sekarang masalahnya di Indonesia adalah bahwa selama ini sejak krisis ekonomi 1997/98, banyak faktor lain selain suku bunga yang juga menjadi pertimbangan serius bagi setiap investor sebelum mengambil keputusan untuk menanam modalnya di Indonesia, seperti kondisi infrastruktur, keamanan, kepastian hukum, stabilitas sosial dan politik, ketersediaan sumber daya manusia dan industri pendukung, dan lain-lain. (Kadin, 2006).

Salah satu faktor pendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi adalah investasi, baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA). Jumlah investasi sebagian besar

harus datang dari sektor swasta. Maka yang paling penting adalah membangun iklim investasi yang menarik, terutama diarahkan untuk menciptakan iklim kebijaksanaan yang kondusif serta rekomendasi untuk mengembangkan prasarana dan sarana pendukung investasi dunia usaha, juga penyediaan informasi dan peluang usaha yang seimbang.

Lemahnya kegiatan investasi baru juga oleh karena bagi pengusaha kepastian hukum sejak reformasi telah berkurang. Pelaksanaan otonomi daerah menambah ketidak pastian. Indonesia sekarang terkenal sebagai *high-cost economy* hal ini dapat dilihat karena sejak 1998 praktis tidak ada investasi pemerintah di bidang infrastruktur ini, hal ini dapat dilihat investasi menurun secara drastis, dimana pada tahun 1997, PMDN sebesar Rp. 119.872,9 miliar dan PMA sebesar US\$ 33.832,5 juta, dan pada tahun 1998 PMDN sebesar Rp. 60.749,3 miliar dan PMA sebesar US\$ 13.563,1 juta.

Investasi asing, sekalipun minat tetap tinggi sebagaimana terlihat dari cukup tingginya tingkat persetujuan PMA, realisasinya rendah karena investor menganggap belum terjadinya perbaikan yang berarti dalam lingkungan investasi. Sejak krisis ekonomi 1997, praktis investasi sangat seret untuk masuk ke Indonesia. Bahkan, perusahaan asing yang berada di Indonesia menunda investasi karena ketidakpastian hukum dan lemahnya jaminan keamanan. Mereka cenderung untuk melakukan investasi baru di tempat lain. Investor baru takut masuk ke Indonesia.

Pada tahun 2006 stabilitas ekonomi makro dapat terjaga dengan cukup baik, namun hal tersebut tidak berhasil membangkitkan rasa optimis di kalangan masyarakat. Tingginya tingkat ketidakpastian di kalangan dunia usaha merupakan penyebab utama dari rendahnya tingkat investasi sepanjang tahun 2006 lalu, dan ini tidak lepas dari tidak kunjung kondusifnya iklim usaha di sektor produksi riil. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dikatakan tidak efektif untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif karena seringkali dibayangi oleh keragu-raguan pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan tersebut.

Dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang hanya sekitar 5,48 persen selama tahun 2006, Selain itu, banyaknya bencana alam yang terjadi di tahun 2006 dan 2007 juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan fokus pemerintah

untuk meningkatkan pertumbuhannya terbagi ke faktor lain, yaitu pemulihan daerah bencana alam.

Untuk mendorong investasi, maka sejumlah masalah struktural yang ada harus diselesaikan. Masalah tersebut antara lain lemahnya dukungan iklim investasi dan struktur pasar, belum memadainya ketersediaan infrastruktur, permasalahan birokrasi, rendahnya produktivitas, dan inefisiensi faktor produksi (Kompas, 2007). Menyimak hal tersebut, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 yang diperkirakan sekitar 7 persen akan banyak bergantung pada konsumsi masyarakat.

Penurunan investasi secara langsung berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi. Dari sisi lalu lintas modal, masih terjadi pelarian modal modal di mana arus modal keluar oleh swasta masih lebih besar dibandingkan arus modal keluar oleh swasta lebih besar dibandingkan arus modal swasta yang masuk. Penurunan tingkat investasi ini disebabkan oleh beberapa hal, terutama faktor keamanan dan stabilitas politik. Situasi keamanan yang masih belum membaik telah menghambat niat investor dalam dan luar negeri untuk segera menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk itu pemulihan keamanan dan ketertiban serta stabilitas politik menjadi prasyarat bagi meningkatnya kegiatan investasi. (Propenas, 2001)

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat kita definisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi antara satu dengan yang lain sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono, 1981). Untuk mengukur besarnya pertumbuhan ekonomi pada suatu negara/daerah dapat digunakan suatu indikator penting, yaitu nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atau nilai Produk Domestik Regional Bruto. Menurut Sukirno (1985) Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian dalam masa satu tahun.

Ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi (Suparmoko, 1998) yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Teori Pertumbuhan Adam Smith

Menurut Adam Smith, untuk berlangsungnya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas bertambah. Disebutkan pula olehnya bahwa sebelum ada pembagian kerja harus ada akumulasi modal di mana modal ini berasal dari investasi dan tabungan. Di samping itu pasar harus seluas mungkin, agar dapat menampung hasil produksi dan karena perdagangan luar meluaskan pasar, maka pasar terdiri dari pasar dalam negeri dan pasar luar negeri.

Teori Harrod-Domar (2000)

Kedua Pakar ini berpendapat bahwa akumulasi capital dalam pembangunan ekonomi punya peranan ganda, yaitu menimbulkan pendapatan dan menaikkan kapasitas produksi.

Untuk mempertahankan keseimbangan pada tingkat *full employment*, maka diperlukan pengeluaran berupa investasi untuk menyerap kenaikan output yang terjadi sesuai dengan pertambahan penduduk untuk menjaga agar pendapatan per kapita tidak turun. Semakin besar pendapatan nasional, maka investasi yang dibutuhkan juga semakin besar.

Suku Bunga

Suku bunga merupakan suatu sasaran kebijaksanaan moneter yang sangat besar pengaruhnya karena suku bunga memegang peranan penting di dalam kegiatan perekonomian, sehingga beberapa pendapat dikemukakan oleh para ahli tentang suku bunga. Menurut Samuelson (1994) bahwa suku bunga adalah harga yang harus dibayar bank atau peminjam lainnya untuk memanfaatkan uang selama jangka waktu tertentu. Pada prinsipnya "tingkat bunga adalah harga atas penggunaan uang atau sebagai sewa atas penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu". Harga atas penggunaan uang biasanya dinyatakan dalam persen (%) dalam jangka waktu tertentu (misal 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun), harga penggunaan uang per unit disebut tingkat bunga (Boediono, 1985). Jumlah maksimum yang akan diinvestasikan perusahaan tergantung pada suku bunga, yaitu biaya dari pinjaman, perusahaan hanya akan berinvestasi sepanjang *marginal productivity of capital* melebihi atau sama dengan suku bunga. Dengan kata lain, perusahaan hanya akan menerima proyek-proyek yang memberikan

keuntungan tidak lebih kecil dari biaya dana yang dipinjamnya. Jadi permintaan perusahaan terhadap pinjaman berhubungan negatif. Pada suku bunga yang rendah, lebih banyak proyek yang menawarkan laba dan perusahaan mau meminjam lebih banyak.

Tingkat suku bunga dalam teori Klasik yang beranjak dari teori mikro merupakan nilai balas jasa dari modal menurut teori Klasik, bahwa tabungan masyarakat adalah fungsi dari suku bunga. Makin tinggi tingkat suku bunga makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Artinya pada tingkat suku bunga yang lebih tinggi masyarakat akan lebih terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi pengeluaran untuk konsumsi guna menambah tabungannya. Investasi juga merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Makin tinggi tingkat suku bunga, maka keinginan masyarakat untuk melakukan investasi semakin kecil. Hal ini karena penggunaan dana (*cost of capital*) menjadi semakin mahal. Sebaliknya makin rendah tingkat suku bunga maka keinginan untuk melakukan investasi akan meningkat (Nasution, 1991).

Investasi

Penanaman modal (investasi) dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa akan datang. (Sukirno, 1994).

Menurut Smith, Investasi dilakukan karena para pemilik modal mengharapkan keuntungan, dan harapan masa depan keuntungan bergantung pada iklim investasi pada hari ini dan pada keuntungan nyata (Hakim, 2002)

Teori Neo Klasik

Menurut teori Neo Klasik, suatu investasi akan dijalankan apabila pendapatan lebih besar dari tingkat bunga, dan investasi dalam suatu barang modal adalah menguntungkan jika biaya sewa ditambah bunga lebih kecil daripada hasil pendapatan yang diharapkan dari investasi tersebut

Teori Keynes

Masalah investasi, baik penentuan jumlah maupun kesempatan untuk melakukan investasi oleh Keynes didasarkan atas konsep *Marginal Efficiency of Investment* (MEI) lebih tinggi daripada tingkat bunga.

Teori Klasik

Menurut teori Klasik, investasi merupakan suatu pengeluaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan potensi masyarakat untuk meningkatkan produksi. Jadi investasi merupakan pengeluaran yang akan menambah jumlah alat-alat produksi dalam masyarakat, dimana pada akhirnya akan menambah pendapatan, sehingga pertumbuhan ekonomi akan tercapai. Di samping faktor biaya modal berupa tingkat bunga dan keuntungan yang diharapkan dari investasi, adapula faktor lain yang turut mempengaruhi keputusan seorang investor untuk melakukan investasi antara lain pajak, perkembangan teknologi, penambahan penduduk, akumulasi modal serta perkiraan dan harapan (*expectation*) tentang situasi ekonomi di masa depan.

Menurut Sukirno, (1994), secara umum makin rendah tingkat bunga yang akan dibayar para pengusaha semakin banyak usaha yang dapat dilakukan. Tingkat suku bunga merupakan variabel penting dalam suatu perekonomian, karena merupakan faktor penentu investasi dan permintaan agregat. Apabila tingkat suku bunga rendah, volume investasi adalah tinggi, sedangkan apabila tingkat suku bunga tinggi, maka permintaan akan uang mengadakan investasi rendah. Hal ini disebabkan karena apabila tingkat bunga rendah, maka permintaan akan uang untuk mengadakan investasi adalah tinggi dari jumlah uang beredar (M_s) bertambah. Faktor utama lainnya yang sangat mempengaruhi investasi adalah keuntungan yang diharapkan dari pengeluaran modal tersebut, yang biasa disebut Efisiensi Investasi (*Marginal Efficiency of Investment*)/MEI. Kurva MEI adalah kurva yang mencerminkan skedul permintaan akan investasi yang relevan untuk seluruh perekonomian dengan slope yang negatif.

Kerangka Pikir

Dengan adanya tingkat suku bunga yang rendah, terutama suku bunga kredit akan menyebabkan jumlah uang beredar di masyarakat akan meningkat, dan peningkatan jumlah uang beredar ini akan digunakan oleh para investor untuk

melakukan kegiatan investasi sehingga akan terjadi peningkatan kegiatan investasi. Peningkatan kegiatan investasi ini berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena dengan adanya investasi maka akan terbuka lapangan-lapangan kerja baru dan terjadinya pemberdayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga peningkatan kualitas potensi-potensi yang ada pada suatu negara akan terwujud, dan akan meningkatkan kualitas suatu bangsa melalui pencapaian pertumbuhan ekonomi yang didam-idamkan.

Penurunan tingkat suku bunga kredit tersebut akan mendorong para pengusaha untuk melakukan pinjaman di bank untuk melakukan kegiatan ekonomi, menghasilkan barang dan jasa sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi dan dari kegiatan tersebut tercipta pertumbuhan ekonomi, diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga tercipta welfare atau kesejahteraan masyarakat seperti yang diinginkan.

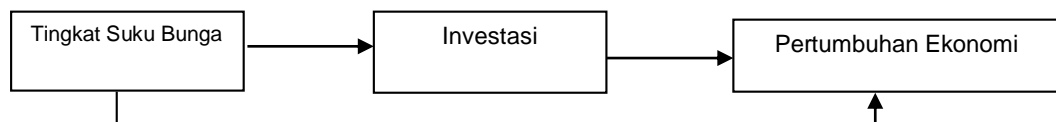
Peningkatan kegiatan investasi itu senantiasa sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, karena investasi merupakan variabel makro ekonomi yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (dalam hal ini PDB), melalui efek penggandanya (*multiplier effect*). Maka itu setiap negara senantiasa berusaha menarik investor ke negaranya untuk melakukan investasi dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan dan jaminan-jaminan bagi para investor. Misalnya saja penetapan pajak investasi yang rendah dan pemberian jaminan keamanan bagi para investor. Hal tersebut membuktikan bahwa betapa pentingnya kegiatan investasi dalam suatu negara. Dengan adanya kegiatan investasi, maka akan membuka lapangan-lapangan kerja baru, sehingga akan menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran (*unemployment*). Dengan terserapnya banyak tenaga kerja maka akan menambah pendapatan perkapita masyarakat yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan akan tercapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.

Di satu pihak untuk mendorong terlaksananya pembangunan ekonomi sangat dibutuhkan investasi terutama investasi swasta. Investasi tersebut dapat diperoleh dari dalam negeri maupun penanaman modal luar negeri. Dengan adanya investasi tersebut maka akan mendorong berlangsungnya proses produksi sehingga dapat menghasilkan output. Sementara itu devisa yang diperoleh dari hasil ekspor dapat digunakan untuk menghasilkan output yang lebih besar.

Dengan meningkatnya output dalam negeri maka akan mendorong pula pertumbuhan ekonomi (PDB) sehingga secara otomatis jika PDB tersebut meningkat maka pendapatan nasional akan meningkat.

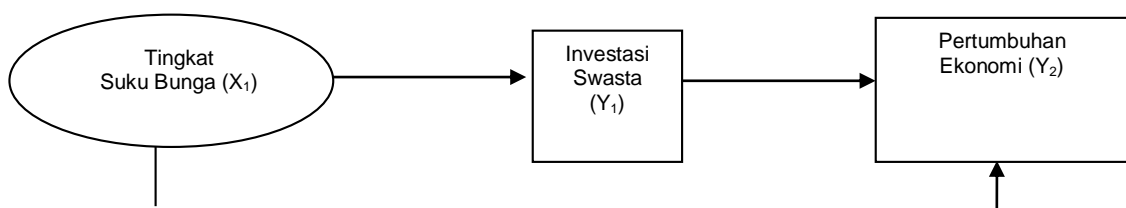
Gambar 1.

Alur Kerangka Pikir Hubungan Tingkat Suku Bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Peranan Investasi Swasta



Kerangka konseptual dalam menganalisis tingkat suku bunga (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_2) melalui investasi swasta (Y_1) tergantung pada asumsi eksogenitas dan endogenitas suatu variabel yang ingin diteliti. tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi swasta yang menjadi variabel eksogen adalah tingkat suku bunga, sedangkan investasi swasta pertumbuhan ekonomi sebagai variabel endogen.

Pada saat investasi swasta dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, investasi swasta sebagai variabel dependen dan tingkat suku bunga sebagai variabel independent, sehingga dapat dituliskan dalam bentuk fungsi: $Y_1 = f(X_1)$. Pada saat pertumbuhan ekonomi dipengaruhi tingkat suku bunga dan investasi swasta Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen maka tingkat suku bunga dan investasi swasta sebagai variabel independen, sehingga dapat dituliskan dalam bentuk fungsi $Y_2 = f(X_1, Y_1, .)$. Persamaan ini merupakan fungsi atau sistem persamaan simultan, seperti yang terdapat dalam gambar berikut



Catatan :

- X_1 = Tingkat Suku Bunga,
- Y_1 = Investasi Swasta (realisasi PMA dan PMDN)
- Y_2 = Pertumbuhan Ekonomi

Pada gilirannya hasil penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi swasta, sehingga dalam kerangka makro akan bermanfaat sebagai salah satu informasi penting dalam menentukan dan menganalisis pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pembangunan lainnya.

METODE PENELITIAN

Dalam konsep pembangunan, investasi dipandang sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan kesempatan kerja terbuka luas. Karena itu, negara-negara berkembang berlomba-lomba untuk menarik investasi sebesar mungkin. (Juoro, 2007)

Menurut Malthus faktor-faktor ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan suatu negara adalah faktor akumulasi modal. Tanpa akumulasi modal yang diinvestasikan, proses produksi akan berhenti dan pertumbuhan ekonomi yang potensial akan berhenti. (Hakim, 2002). Menurut Chandler (1989) keputusan-keputusan mengenai jumlah investasi baru tergantung dari perbandingan antara biaya bunga dengan perkiraan hasil tahunan dari investasi baru tersebut. Secara umum makin rendah tingkat bunga yang akan dibayar para pengusaha semakin banyak usaha yang dapat dilakukan. (Sukirno, 1985).

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan eksplanasi (explanatory research) dengan mengadakan analisis data sekunder yang berupa data time series yang bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang pengaruh tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi: analisis investasi swasta di Indonesia tahun 1987 - 2006

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berbentuk time series di Indonesia dari tahun 1987 sampai tahun 2006 meliputi: tingkat suku bunga, investasi swasta, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui laporan-laporan dan dokumen-dokumen dari berbagai instansi terkait seperti kantor Statistik dan Bank Indonesia

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yaitu Riset Kepustakaan (*Library Research*). Dalam hal ini bertujuan untuk mendapatkan dasar-dasar teoritis mengenai hal-hal yang akan diteliti, baik buku-buku, laporan-laporan ataupun sejenisnya yang didokumentasikan oleh pemerintah atau pihak-pihak tertentu melalui Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia.

Metode Analisis

Berdasarkan model structural pada kerangka pikir di atas (gambar 1), maka dapat dibentuk persamaan fungsional dalam model simultan (Structural Equation Modelling, SEM). Berdasarkan model structural pada kerangka pikir, maka dengan menggunakan data time series selama 20 tahun dan menggunakan program AMOS 7.0 didapat hasil analisis SEM.

Terdapat dua jenis parameter (nilai-nilai statistik) yang dapat diestimasi dari model SEM tersebut. Pertama, nilai-nilai statistik dari data yang tidak distandardisasi (*unstandardized regression weights*) dan kedua, nilai-nilai statistik dari data yang distandardisasi (*standardized regression weights*).

Nilai-nilai yang dipakai dalam pembahasan ini adalah "*unstandardized regression weights*" yang sudah lolos dari uji dari *goodness of fit* bukan "*standardized regression weights*", meskipun sudah lolos dari uji *goodness of fit*. Hal ini dilakukan karena analisis ini bertujuan untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh (dampak) variabel-variabel bebas (*independen*) terhadap variabel-variabel terikat (*dependen*). Jadi bukan untuk membandingkan bahwa variabel bebas mana yang paling dominan (*comparative analysis*) terhadap variabel terikat. Kemudian untuk melihat apakah hasil analisis model SEM yang telah dilakukan sudah *fit* atau belum, digunakan uji-Fit model. Dari hasil analisis SEM yang ada di dapat hasil estimasi model keseluruhan, baik pada unstandarisasi *regression weights* maupun *standardized regression weights*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Tingkat Suku Bunga di Indonesia

Tingkat suku bunga erat sekali hubungannya dengan investasi. Pada saat tingkat suku bunga tinggi, permintaan terhadap kredit turun. Inilah nanti yang akan mempengaruhi investasi, karena para investor mengalami kekurangan dana untuk

melaksanakan kegiatan investasinya. Berdasarkan Tabel 1, perkembangan tingkat suku bunga kredit di Indonesia dari tahun 1987-2006 memperlihatkan bahwa tingkat suku bunga kredit mengalami fluktuasi.

Pada tahun 1990 tingkat suku bunga kredit modal kerja sebesar 20.51% dan suku bunga kredit investasi sebesar 19.08%. Namun kemudian pada tahun 1991, tingkat suku kredit bunga modal kerja dan kredit investasi mengalami kenaikan yaitu masing-masing sebesar 25.85% dan 21.18%, kenaikan ini merupakan reaksi dari memanasnya perekonomian pada tahun ini dengan laju inflasi yang cukup tinggi. (Bappenas, 1993) Memasuki tahun 1992 tingkat suku bunga sudah dapat ditekan kembali. Tingkat suku bunga kredit modal kerja pada tahun 1992 ini turun menjadi 22.16% dan tingkat suku bunga kredit investasi sebesar 18.80%. Penurunan ini sebagai dampak dari kebijaksanaan uang ketat yang dilakukan pemerintah untuk menghambat laju inflasi yang tinggi, sehingga laju inflasi pada tahun 1992 dapat ditekan ke tingkat yang lebih rendah. (Bappenas, 1993)

Pada tahun 1993, tingkat suku bunga kembali mengalami penurunan, tingkat suku bunga kredit modal kerja sebesar 19.37% dan tingkat suku bunga kredit investasi sebesar 16.34%. Kemudian pada tahun 1994 tingkat suku bunga kredit modal kerja sebesar 16.77% dan tingkat suku bunga kredit investasi sebesar 14.25%, angka terendah sejak Deregulasi 1 Juni 1983. Rendahnya tingkat suku bunga kredit pada tahun 1994 ini dikuatirkan akan menimbulkan kelangkaan dana pada bank-bank untuk membiayai proyek-proyek investasi. Di sudut lain penurunan tingkat suku bunga ini akan menyebabkan berbagai usaha layak untuk diinvestasikan

Tingkat suku bunga kredit ini dari tahun ke tahun semakin meningkat sejak tahun 1995, 1996, 1997 dan 1998 dengan peningkatan masing-masing kredit modal kerja yaitu sebesar 16.86%, 17.03%, 21.98% dan 32.27% sedangkan tingkat suku bunga kredit investasi masing-masing sebesar 14.51%, 15.08%, 17.34% dan 23.16%. Tingkat suku bunga pada tahun 1998 merupakan angka tertinggi sepanjang tahun pengamatan. Peningkatan tingkat suku bunga ini merupakan dampak dari kebijaksanaan uang ketat yang dilakukan pemerintah guna mengerem tekanan iflasi dan melemahnya nilai tukar..

Tabel 1
Perkembangan Tingkat Suku Bunga di Indonesia (dalam %)

Tahun	Tingkat Bunga Kredit		
	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi
1987	22.1	19	
1988	22.3	19.7	
1989	21	19.3	
1990	20.51	19.08	
1991	25.85	21.18	
1992	22.16	18.8	
1993	19.37	16.34	
1994	16.77	14.25	
1995	16.86	14.51	
1996	17.03	15.08	
1997	21.98	17.34	
1998	32.27	23.16	
1999	28.89	22.93	
2000	18.43	16.59	
2001	19.19	17.9	19.85
2002	18.25	17.82	20.21
2003	15.07	15.68	18.69
2004	13.41	14.05	16.57
2005	16.23	15.66	16.83
2006	15.07	15.10	17.58

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2007

Untuk mencapai stabilitas perekonomian makro yang mantap serta untuk mendorong tercapainya iklim yang kondusif bagi pemulihan kegiatan ekonomi maka stabilitas moneter dengan menurunkan tingkat suku bunga dan menyempurnakan ketentuan dalam prinsip kehati-hatian merupakan salah satu kebijakan yang diambil pemerintah.

Pada tahun 1999 hingga pada tahun 2000, tingkat suku bunga kembali mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan angka penurunan pada tahun 1999 tingkat suku bunga kredit modal kerja sebesar 28.89% dan tingkat suku bunga kredit investasi sebesar 22.93% dan pada tahun 2000 tingkat suku bunga kredit modal kerja sebesar 18.43% dan tingkat suku bunga investasi sebesar 16.59%

Penurunan tingkat suku bunga ini akan mendorong para investor mengambil kredit bank untuk melakukan kegiatan investasi yang tentu saja peningkatan kegiatan investasi ini akan membuka banyak lapangan kerja baru, sehingga pendapatan perkapita masyarakat dapat ditingkatkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan juga dapat tercapai. Begitu pun sebaliknya apabila tingkat suku bunga kredit naik, maka investor enggan mengambil kredit di bank karena tingkat suku bunga merupakan "biaya" yang harus dibayar oleh investor.

Perkembangan Investasi Swasta di Indonesia

Sudah menjadi pengetahuan kita bersama bahwa kegiatan pembangunan merupakan hasil dari kegiatan investasi. Kegiatan investasi itu sendiri pada hakekatnya adalah kegiatan pendayagunaan sumber daya yang tersedia baik sumber daya alam dan manusia maupun sumber modal dan teknologi. Oleh karena pertumbuhan ekonomi hanya dapat dicapai dengan cara mendayagunakan sumber daya alam, manusia, modal dan teknologi, maka cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi tergantung pada tinggi rendahnya kegiatan investasi.

Keikutsertaan sektor swasta secara lebih luas telah mendorong terjadinya pergerakan modal dan peningkatan investasi dalam perekonomian. Pengembangan sektor swasta erat kaitannya dengan pengembangan kegiatan ekonomi di sektor non migas, yang merupakan bagian terbesar dari sumber kehidupan masyarakat. Diperkirakan sekitar tiga perempat dari kegiatan ekonomi di sektor non migas dikuasai dan dikembangkan oleh sektor swasta, diantaranya yang terbesar adalah di sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi, pengangkutan, perdagangan, serta jasa lainnya. Pengembangan di sektor non migas tersebut sudah memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan nilai tambah dalam perekonomian yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan pendapatan dan laju pertumbuhan ekonomi. (Bappenas, 1993).

Dalam upaya meningkatkan investasi di Indonesia dan agar keberadaan investasi itu dapat berlaku efektif, maka telah dikeluarkan dan diberlakukan undang-undang penanaman modal. Undang-undang pertama adalah Undang-Undang No. 6 tahun 1968 Jo, tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Undang-Undang No. 1 tahun 1967 Jo, tentang Penanaman Modal Asing. Kedua undang-undang ini menawarkan paket intensif (perangsang) berupa fiskal dan bea yang bertujuan untuk menarik investor. Kebijakan ini juga diikuti dengan berbagai penyederhanaan prosedur perizinan penanaman modal, kemudahan memperoleh kredit, penyederhanaan DSP (Daftar Skala Prioritas) yaitu sistem pajak dan pengurusan dokumen keluar masuknya barang di pelabuhan (Bappenas, 1993).

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1988 mengarahkan agar pengembangan dunia usaha nasional yang terdiri dari usaha negara dan swasta makin mampu berperan dalam menciptakan struktur ekonomi yang lebih kokoh, mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya, termasuk memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Investasi di Indonesia mengalami pasang surut, hal ini tentu tidak terlepas dari pengaruh ekonomi dan non-ekonomi yang ada.

Berbagai kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi yang telah ditempuh antara lain bertujuan mendorong penanaman modal dalam negeri dan asing, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 5, peningkatan investasi yang terus menerus dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1990, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), dimana PMDN dari tahun 1987 sampai tahun 1990 masing-masing sebesar Rp. 10.265,0 milyar, Rp. 14.915,9 milyar, Rp. 19.593,9 milyar, dan Rp. 59.878,4 milyar, sedangkan PMA sebesar Rp. 1.456,9 milyar, Rp. 4.434,4 milyar, Rp. 4.718,8 milyar, dan Rp. 8.750,1 milyar. Sumber: Badan Pusat Statistik, 2007

Pada tahun 1990 Indonesia mengalami *booming* investasi dengan total Jumlah investasi yang disetujui pemerintah yang meliputi bidang usaha pertanian, kehutanan, pengangkutan perumahan dan perkantoran serta jasa-jasa lainnya, sebesar Rp. 68.628,5 milyar dengan persentase pertumbuhan sebesar 182.3%, dimana besarnya PMDN adalah Rp. 59.878,4 milyar dan PMA sebesar Rp. 8.750,1 milyar. Terjadinya ledakan investasi ini merupakan serangkaian tindakan yang ditujukan untuk memperbaiki iklim investasi yang dilakukan pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya. Secara sistematis pemerintah

mengurangi jumlah sektor yang tertutup untuk investor asing. Batas minimum investasi modal diturunkan dari \$1 juta menjadi \$250.000 dan perluasan produk diperbolehkan tanpa perlu izin baru. Dalam upaya memperluas bidang-bidang investasi dan mempermudah permohonan investasi, telah dilakukan penyempurnaan dengan menghapus Daftar Skala Prioritas dan menerapkan Daftar Negatif Investasi pada Mei 1989. Implikasi dari sistem ini adalah bidang-bidang yang secara khusus dinyatakan tertutup semakin sedikit.

Tabel 2.
Perkembangan Investasi di Indonesia dari tahun 1987 sampai dengan 2006
(dalam Milyar Rupiah)

Tahun	PMDN (Milliar Rp)	PMA (Juta US)	Total Investasi	Persentase Pertumbuhan
1987	10.265,0	1.456,9	11.721,9	0
1988	14.915,9	4.434,4	19.350,3	65.1
1989	19.593,9	4.718,8	24.312,7	25.6
1990	59.878,4	8.750,1	68.628,5	182.3
1991	41.084,8	8.778,2	49.863,0	-27.3
1992	29.341,7	10.340,0	39.681,7	-20.4
1993	39.450,40	8.141,8	47.592,2	19.9
1994	53.289,10	23.724,3	77.013,4	61.8
1995	69.853,00	39.914,7	109.767,7	42.5
1996	100.715,2	29.931,4	130.646,6	19
1997	119.872,9	33.832,5	153.705,4	17.6
1998	60.749,3	13.563,1	74.312,4	-51.7
1999	53.550,0	10.890,6	64.440,6	-13.3
2000	92.327,7	15.413,1	107.740,8	67.2
2001	58.674,0	15.043,9	73.717,9	-31.6
2002	25.262,3	9.744,1	35.006,4	-52.5
2003	48.484,8	13.207,2	61.692,0	76.2
2004	36.747,6	10.277,3	47.024,9	-23.8
2005	50.577,4	13.579,3	64.156,7	36.4
2006	162.767,1	15.623,9	178.391,0	178.1
JUMLAH	1.147.400,5	291.365,6	1.438.766,1	

Kemudian pada tahun 1991 terjadi penurunan pada jumlah total investasi yaitu Rp. 49.863,0 milyar dengan persentase pertumbuhan -27.3%. Diperkirakan suku bunga yang tinggi menjadi salah satu penyebab terjadinya penurunan ini, di samping terjadi inflasi yang memanas pada tahun tersebut.

Untuk mencegah berulangnya terjadi penurunan investasi, maka pemerintah mengambil suatu kebijakan melalui Paket Juli 1992. Dalam Paket Juli 1992 ini, telah diberikan berbagai kemudahan melalui penyederhanaan Daftar Negatif Investasi (DNI) dan kepemilikan saham hingga 100% bagi investor asing yang menanamkan modalnya pada lokasi tertentu (KTI). Sayangnya, kebijakan pemerintah yang tertuang dalam PP No. 17/1992 tersebut dinilai kurang efektif (izin investasi bertambah ruwet), sehingga tetap terjadi penurunan pada jumlah total investasi pada tahun tersebut, dengan jumlah total sebesar Rp. 39.681,7 milyar, dimana besarnya PMDN adalah Rp. 29.341,7 milyar dan PMA sebesar Rp. 10.341,7 milyar.

Menanggapi keadaan tersebut pemerintah melakukan suatu terobosan besar dengan mengadakan penghapusan larangan-larangan yang telah lama dipertahankan melalui Pakto 1993, misalnya telah dikeluarkan PP No. 50/1993 yang membenarkan investor asing memiliki saham hingga 100%. Bahkan pada tahun 1994, pemerintah meluncurkan sebuah paket deregulasi yang dinilai sangat liberal. Bidang usaha yang dikategorikan "menguasai hajat hidup orang banyak" dan bahkan ditabukan bagi swasta domestik kini terbuka bagi investor asing (PP No. 20/1994).

Paralel dengan kebijakan di atas, maka terjadi peningkatan jumlah investasi yang disetujui pemerintah pada tahun 1993 dan 1994 dengan nilai persentase pertumbuhan masing-masing sebesar 19.9% dan 61.8%. Namun kemudian pada tahun 1995 besarnya investasi ini kembali mengalami peningkatan, namun peningkatan ini sangat kecil dengan nilai investasi sebesar Rp. 109.767,7 dengan persentase pertumbuhan 42,5% dibandingkan dengan tahun 1994 yang persentase pertumbuhannya sebesar 61.8%. Akibat suku bunga riil yang meningkat, maka selama dua tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 1996 dan tahun 1997 jumlah investasi mengalami peningkatan yang sangat kecil dengan persentase pertumbuhan masing-masing adalah 19.0% dan 17.6%.

Sejak krisis ekonomi 1998, Indonesia terus mengalami penurunan investasi. Banyak investor yang sudah menanamkan modalnya hengkang dari Indonesia, yang semakin hari semakin tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Musim paceklik investasi di Indonesia jelas terlihat dari menurunnya arus investasi sejak tahun 1998. Faktor penyebabnya adalah masalah perburuhan (meningkatnya biaya buruh dan demonstrasi buruh), masalah pabean, tak adanya insentif fiskal, dan berbagai kebijakan yang tidak pro-bisnis, serta biaya produksi semakin tinggi. Tidak adanya kepastian hukum dan keamanan merupakan faktor utama menurunnya angka investasi di Indonesia dan juga penyebab hengkangnya beberapa investor yang sudah ada ke luar negeri pada tahun 1998. (Kuncoro, 1998)

Pada tahun 1998 jumlah total investasi yang disetujui pemerintah menurun secara drastis dengan jumlah sebesar Rp. 74.312, 4 milyar, dengan persentase pertumbuhan -51.7%, dimana besarnya PMDN adalah sebesar Rp. 60.749,3 milyar dan PMA sebesar Rp. 13.563,1 milyar. Meski iklim investasi tahun 1999 relatif kondusif dibanding tahun sebelumnya, akan tetapi krisis ekonomi yang

terjadi sejak tahun 1997 membuat jumlah investasi pada tahun 1999 Rp. 64.440,6 milyar atau mengalami kontraksi sebesar -13.3%.

Membaiknya perekonomian pada tahun 2000 menyebabkan pertumbuhan investasi yang mantap kembali terjadi pada tahun 2000 dengan total jumlah investasi yang disetujui sebesar Rp. 107.740,8 milyar, di mana besarnya PMDN adalah Rp. 92.327,7 milyar dan PMA sebesar Rp. 15.413,1 milyar dengan persentase pertumbuhan sebesar 67.2%.

Pada tahun 2001 dan tahun 2002 investasi kembali mengalami penurunan yang cukup drastis dengan jumlah kredit investasi masing-masing Rp. 73.719,9 dan Rp. 35.006,4 dengan persentase pertumbuhan yang negatif yaitu masing-masing -31.6% dan -52.5%

Tahun 2003 telah dicanangkan sebagai tahun investasi di Indonesia (*Indonesian Investment Year 2003*). Alasan pencanangan tersebut diantaranya dikarenakan terus menurunnya nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) beberapa tahun belakangan ini (Zamroni, 2007). Pada tahun 2003 nilai investasi mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2002. pada tahun 2003 nilai PMDN sebesar Rp. 48.484,4 milyar dan PMA sebesar Rp. 9.744,1 milyar. Peningkatan ini disebabkan karena dilakukan perbaikan-perbaikan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif apalagi Indonesia masih merupakan negara yang potensial untuk investasi sehingga investor baru mau melakukan investasinya di Indonesia dan investor yang sudah ada dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

Nilai investasi masih meningkat pada tahun 2005, di mana nilai PMDN sebesar Rp. 50.577,4 milyar dan PMA sebesar Rp. 13.579,3 milyar. Kecendrungan investasi yang masih tumbuh pada pada tahun 2005 juga terlihat pada peningkatan ijin usaha tetap (IUT) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kecendrungan yang menggembirakan ini juga terlihat pada tahun 2006.

Minat investasi pada tahun 2006 cukup tinggi, seperti yang dicerminkan pada meningkatnya rencana investasi sektor non migas yang diajukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada tahun 2006 terjadi peningkatan investasi yang cukup drastis sebesar Rp. 178.391,0 milyar dengan persentase pertumbuhan sebesar 178.1% dibanding tahun sebelumnya nilai PMDN sebesar Rp. 162.767,1 milyar dan PMA sebesar Rp. 15.623,9 milyar .

Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara Asia Timur yang sedang bertumbuh yang tingkat pertumbuhannya diperkirakan akan meningkat. Pertumbuhannya diperkirakan akan naik menjadi 6.3 persen di tahun 2007 karena kebijakan fiskal dan moneter memberikan dorongan. Kenyataannya, pergerakan naik dimulai di paruh kedua 2006 dipicu kenaikan dalam konsumsi dan investasi swasta, serta ekspor yang melebihi US \$ 100 milyar untuk pertama kalinya. Sejalan dengan perkiraan peningkatan signifikan pada investasi swasta dan peningkatan yang semakin besar pada belanja modal pemerintah. Prakiraan peningkatan investasi swasta baik berbentuk PMA maupun PMDN pada semester II-2007 ini, selain didorong oleh semakin kuatnya keyakinan pelaku ekonomi terhadap prospek peningkatan perekonomian ke depan, juga disebabkan oleh kontribusi positif tren penurunan suku bunga domestik. Berbagai kondisi ini diperkirakan akan menyebabkan investasi swasta pada tahun 2007 lebih tinggi dibandingkan tahun 2006.

Pemerintah ingin mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Salah satunya, dengan mendorong masuknya investasi swasta, baik asing maupun domestik, yang menyentuh angka Rp. 1.000 milyar lebih di 2008.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Pembangunan ekonomi adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi berskala besar, yaitu skala sebuah negara. Karena skalanya yang besar tersebut, untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan sebuah pembangunan ekonomi bukanlah hal yang mudah. Di samping skala yang besar tersebut, yang membuat evaluasi pembangunan meliputi banyak hal atau multidimensional. Untuk menjaga tiga hal tersebut, para ahli ekonomi pembangunan kemudian menyusun berbagai indikator pembangunan.

Laju pertumbuhan PDB (*Produk Domestik Bruto*) adalah salah satu indikator utama ekonomi makro yang sering digunakan untuk menganalisis kinerja ekonomi sebuah negara. Indikator tersebut mencerminkan potensi pasar di dalam negeri dan proses pembangunan ekonomi di negara tersebut.

Pada Tabel 3 Disajikan data pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan dengan menggunakan tahun dasar 1983 (untuk tahun 1986 sampai tahun 1993), dan tahun dasar 1993 (untuk tahun 1994 sampai tahun 1999), serta menggunakan tahun dasar 2000 (untuk tahun 2000 sampai tahun 2006), artinya

total PDB yang bersangkutan dihitung berdasarkan nilai atau harga pada tahun 1983, 1993 dan tahun 2000.

Tabel 3.
Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan
(FOB dalam Juta US\$)

Tahun	Nilai PDB (Milyar Rp)	Pertumbuhan (%)
1995	202.641	8
1996	218.826	4.6
1997	228.999	-13.2
1998	198.737	0.8
1999	200.31	4.9
2000	210.165	27.1
2001	267.188	4.4
2002	278.875	4.7
2003	292.032	5
2004	306.724	5.7
2005	324.155	5.5
2006	341.93	5.8

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2007

Memasuki tahun 1995 pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat sebesar 8,2% dengan besarnya PDB adalah Rp.383.767,8 milyar, ini adalah laju pertumbuhan yang cukup tinggi yang belum pernah dicapai sebelumnya. Terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 1995, diperkirakan karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan melonjaknya kegiatan investasi baik PMDN maupun PMA.

Selanjutnya pada tahun 1996, laju pertumbuhan ekonomi relatif menurun, yakni 8,0%. dengan nilai PDB sebesar Rp. 414.418,8 milyar. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan susunan pertumbuhan ekonomi Repelita VI dengan rata-rata 7,1%.

Krisis mata uang yang kemudian disusul dengan krisis moneter atau keuangan yang akhirnya berubah menjadi suatu krisis ekonomi yang besar yang dialami Indonesia pada tahun 1997, menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut menurun secara drastis hingga 4.6% dengan nilai PDB sebesar Rp. 433.685,2 milyar. Dan pada tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan secara drastis dengan laju pertumbuhan yang

negatif yaitu sebesar -13,2% dengan nilai PDB sebesar Rp. 376.374,9 milyar. Inipun diakibatkan oleh belum adanya tanda-tanda perbaikan ekonomi pada triwulan pertama akibat krisis moneter. Kontraksi perekonomian yang sangat dalam tersebut mengakibatkan kesejahteraan masyarakat menurun drastis, sementara pengangguran semakin meluas sehingga intensitas kerawanan sosial meningkat. Krisis ini juga berdampak luas pada berbagai sektor lainnya, seperti sektor riil, fiskal, perbankan, transportasi, perdagangan, investasi, dan lain-lain.

Dalam upaya menanggulangi krisis yang terjadi pada periode 1997-1998 pemerintah melakukan usaha-usaha pemulihan akibatnya terjadi krisis ekonomi. Namun usaha-usaha penanggulangan krisis yang dilakukan selama ini berjalan sangat lambat dan ditambah lagi dengan adanya krisis sosial dan politik di dalam negeri menyebabkan terjadinya laju pertumbuhan ekonomi yang melambat pada periode 1999-2000 dengan persentase pertumbuhan masing-masing 0,8% dan 4,9% dengan masing-masing nilai PDB sebesar Rp. 379.352,5 milyar pada tahun 1999 dan nilai PDB sebesar Rp. 398.017,2 milyar pada tahun 2000 (Bappenas, 2001).

Setelah mengalami kontraksi yang besar pada tahun 1998 dan sejak tahun 1999 perekonomian Indonesia mengalami peningkatan tiap tahun yang melambat. Namun dalam kenyataannya, selama tahun 2001, berbagai permasalahan yang kita hadapi ternyata belum menunjukkan kemajuan yang berarti dan beberapa diantaranya menunjukkan kecenderungan yang memburuk. Perekonomian dunia juga menunjukkan pertumbuhan yang terus melambat dan bahkan telah mengalami resesi. (Bank Indonesia, 2002). Pada tahun 2001 laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan laju pertumbuhan sebesar 3,4% dengan nilai PDB sebesar Rp. 411.691,0 milyar. Sementara di dalam negeri, kondisi sosial politik dan keamanan masih belum sepenuhnya menunjukkan kestabilan, yang antara lain diwarnai dengan pergantian pemerintahan pada pertengahan tahun 2001. Meskipun terdapat kemajuan, penanganan program-program restrukturisasi di sektor riil masih menghadapi sejumlah kendala sehingga berbagai permasalahan struktural di dalam negeri masih terus berlanjut, sementara risiko dan ketidakpastian usaha masih tetap tinggi. (Bappenas, 2005)

Dengan berbagai permasalahan tersebut, selama tahun 2001 kondisi ekonomi dan moneter secara umum menunjukkan kecenderungan yang memburuk. Memburuknya kondisi ekonomi dan moneter antara lain ditunjukkan dari menurunnya laju pertumbuhan ekonomi, melemahnya nilai tukar, dan tingginya tekanan inflasi. (Bappenas, 2005).

Pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan 3,7% dengan nilai PDB sebesar Rp. 1.506.117,2 milyar. Pertumbuhan ini memberikan harapan bagi bangsa Indonesia untuk segera keluar dari krisis ekonomi, walaupun pertumbuhan masih di bawah target yang diinginkan yaitu sebesar 4%. Hal ini memperlihatkan pemulihan perekonomian telah berjalan ke arah yang diharapkan.

Kemudian pada tahun-tahun berikutnya terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang lambat pada periode 2003-2005 dengan persentase pertumbuhan masing-masing 4.7% dengan nilai PDB sebesar 1.577.171,3 milyar (2003), 5,0% dengan nilai PDB sebesar 1.656.516,8 milyar (2004), 5.2% dengan nilai PDB sebesar 1.750.656,1 milyar (2005).

Kenyataan menunjukkan bahwa selama 2005, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan relatif tinggi untuk ukuran global. Betapa tidak. Pada 2005 ini, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya 3,2%. Sementara pertumbuhan ekonomi AS 3,6%, Jepang 2,4%, Kanada 2,9%, Australia 2,9%, Jerman 1,1%, Belanda 0,7%, dan Inggris 1,6%.

Sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2006 adalah dari sektor ekspor yang tumbuh besar sebesar 4,1 persen diikuti oleh sumbangan dari konsumsi rumah tangga sebesar 1,9 persen, konsumsi pemerintah sebesar 0,7 persen, pembentukan modal tetap bruto sebesar 0,7 persen dan pengaruh impor sebesar 2,8 persen.

Secara umum pertumbuhan ekonomi tahun 2005 lebih baik dibandingkan tahun 2006. Menurutnya, secara umum pertumbuhan ekonomi tahun 2005 lebih baik dibandingkan tahun 2006., walaupun persentase pertumbuhan tahun 2006 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2005. Hal tersebut disebabkan karena pertumbuhan investasi di tahun 2006 hanya tumbuh kecil, yaitu 2,91 persen atau jauh dibandingkan tahun 2005 yang tumbuh diatas 10 persen, yaitu sebesar 10,8 persen. (Bappenas, 2002)

Pada tahun 2006 stabilitas ekonomi makro dapat terjaga dengan cukup baik, namun hal tersebut tidak berhasil membangkitkan rasa optimis di kalangan

masyarakat. Tingginya tingkat ketidakpastian di kalangan dunia usaha merupakan penyebab utama dari rendahnya tingkat investasi sepanjang tahun 2006 lalu, dan ini tidak lepas dari tidak kunjung kondusifnya iklim usaha di sektor produksi riil. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dikatakan tidak efektif untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif karena seringkali dibayangi oleh keragu-raguan pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan tersebut. (Kadin, 2007)

Dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang hanya sekitar 5,5% selama tahun 2006, Selain itu, banyaknya bencana alam yang terjadi di tahun 2006 juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan fokus pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhannya terbagi ke faktor lain, yaitu pemulihan daerah bencana alam. (Daruningsih, 2007)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2007 diduga akan mengalami peningkatan karena dorongan kebijakan fiskal dan moneter. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan konsumsi dan investasi swasta, serta ekspor yang melebihi US\$ 100 miliar untuk pertama kalinya. (Suara Pembaruan, 2007)

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan-I 2007 diperkirakan sebesar 5,4% atau masih sesuai dengan perkiraan semula. Penguatan pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh kinerja ekspor dan investasi swasta yang mulai meningkat. Sementara, pertumbuhan konsumsi swasta masih lambat. Peningkatan investasi swasta tersebut terindikasi dari pertumbuhan investasi bangunan, yang tercermin pada peningkatan permintaan semen, besi dan baja, adanya peningkatan kredit investasi riil pada berbagai sektor usaha, dan adanya peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang berasal dari peningkatan investasi mesin dalam negeri. (Bank Indonesia, 2007)

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pembahasan secara sistematis disesuaikan dengan tujuan penelitian serta memperhitungkan rumusan-rumusan hipotesis khususnya yang terkait dengan model analisis struktural (SEM), baik secara simultan maupun secara parsial terutama yang berkaitan dengan hubungan–hubungan fungsional seperti; pengaruh tingkat bunga terhadap investasi, pengaruh tingkat bunga terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi kemudian terakhir pengaruh tingkat bunga

terhadap penyerapan tenaga kerja melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengaruh langsung Tingkat Suku Bunga terhadap Investasi Swasta

Tingkat suku bunga berpengaruh signifikan dan negatif terhadap investasi swasta di Indonesia, diperoleh koefisien jalur -0.469 dengan $p = 0,0000$ (signifikan), artinya terdapat pengaruh negatif dan signifikan tingkat suku bunga terhadap investasi swasta.

Menurut Sukirno, (1994), secara umum makin rendah tingkat bunga yang akan dibayar para pengusaha semakin banyak usaha yang dapat dilakukan. Tingkat suku bunga merupakan variabel penting dalam suatu perekonomian, karena merupakan faktor penentu investasi dan permintaan agregat. Apabila tingkat suku bunga rendah, volume investasi adalah tinggi, sedangkan apabila tingkat suku bunga tinggi, maka permintaan akan uang mengadakan investasi rendah. Hal ini disebabkan karena apabila tingkat bunga rendah, maka permintaan akan uang untuk mengadakan investasi adalah tinggi dari jumlah uang beredar (Ms) bertambah. Bila tingkat bunga tinggi, maka masyarakat lebih cenderung untuk menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan dan jumlah uang yang beredar akan berkurang.

Menurut Sukirno (1994) lagi, bahwa investasi terutama ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut: 1). ramalan mengenai keadaan di masa akan datang, 2) tingkat bunga, dan 3) perubahan di dalam perkembangan teknologi. Hasil penelitian ini memperkuat beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu: Louis J. Maccini, Bartholomew Moore dan Huntley Schaller yang melakukan penelitian tentang *The Interest Rate, Learning, and Inventory Investment* dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek tingkat bunga tidak berpengaruh terhadap investasi persediaan tetapi dalam jangka panjang tingkat bunga berpengaruh terhadap investasi persediaan dengan elastisitas sekitar $-1,5$. Implikasi dari hasil penelitian ini, apabila ingin meningkatkan investasi swasta maka tingkat suku bunga perlu diturunkan seperti terlihat pada koefisien jalur -0.469 artinya apabila tingkat suku bunga diturunkan sebesar 1 persen maka investasi akan meningkat sebesar 46,9 persen.

Pengaruh Tidak Langsung

Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Investasi Swasta

Telah dibahas sebelumnya bahwa penurunan tingkat suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi swasta. Sehingga penurunan tingkat suku bunga juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi swasta ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar - 3.334121 artinya jika tingkat suku bunga diturunkan akan mendorong investasi swasta masuk sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat, dengan kata lain apabila tingkat suku bunga turun 1% maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 33,34 % demikian juga sebaliknya apabila tingkat suku bunga naik 1% maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar 33,34 %. Implikasinya, tingkat suku bunga yang semakin meningkat terutama diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana dan lainnya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonom

Penurunan tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap investasi swasta, kemudian investasi swasta berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi penurunan tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi swasta dan ekspor . Hal tersebut nampak pada koefisien sebesar -0.20775 artinya bahwa jika tingkat suku bunga turun 1 persen maka efeknya melalui investasi swasta akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 20,77 persen dan sebaliknya jika tingkat suku bunga naik 1 persen maka efeknya melalui investasi swasta akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 20,77 persen. Implikasinya, bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka tingkat suku bunga harus diturunkan . Hasil ini membuktikan dan menjawab hipotesis kedua.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi swasta. Apabila tingkat suku bunga kredit dinaikkan maka kegiatan investasi akan berkurang, begitu pun sebaliknya. Hal ini disebabkan karena tingkat suku bunga merupakan biaya yang harus dibayar para investor dalam mengambil kredit

perbankan. Hal ini akan menyebabkan berkurangnya keuntungan yang diperoleh investor.

Kedua, tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini berindikasi bahwa kebijakan tingkat suku bunga di Indonesia telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan dapat dilakukan di Indonesia demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan salah satunya adalah melalui investasi swasta dan ekspor. Implikasinya, melalui penurunan tingkat suku bunga terutama diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana dan lainnya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kegiatan ekspor. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan investasi swasta akan meningkatkan kegiatan ekspor. Keempat, investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan investasi ini maka akan terbuka lapangan-lapangan kerja baru, yang selanjutnya akan menyerap banyak tenaga kerja dan kemudian pendapatan perkapita masyarakat akan meningkat, kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pun tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 1991. Jakarta. *Indicator Ekonomi Indonesia*.
- _____. 2007. Jakarta. *Indicator Ekonomi Indonesia*.
- Bank Indonesia. 2002. Jakarta. *Survey Kredit Perbankan*. (<http://www.bi.go.id/biweb/utama/publikasi/upload/kredit-bank-q102.pdf>)
- _____. 2007. Jakarta. *Pernyataan Gubernur Bank Indonesia, Stabilitas Makroekonomi Terus Berlanjut, Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Meningkat, BI Rate Tetap 9%*. www.bi.go.id/web/id/Siaran+Pers/sp_0916.htm-34 k
- _____. 1993. Jakarta. *Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri*. (<http://www.bappenas.go.id/index.php?module=FileManager&func=down&pathext=ContentExpress/&view=423/Bab-05-1993%20cek.doc>)
- _____. 2002. Jakarta. *Kerangka Ekonomi Makro; Lingkungan Internal dan Eksternal Tahun 2005-2006*. Jakarta. (www.bappenas.go.id/.../view=6/bab%2011%20%20kerangka%20ekonomi%20makro.pdf.)

- _____. 2003. Jakarta. *Pengembangan Lembaga Keuangan dan Investasi Infrastruktur*. (http://www.bappenas.go.id/index.php?module=&filemanag erFunc=download&pathext=ContentExpress?view=85/5keuangan_infras_final.pdf)
- _____. 2005. Jakarta. *Perkembangan Ekonomi Makro Tahun 2002-2004*. (www.Bappenas.go.id/index.php?module=contentexpress&func=print&ceid=36)
- Boediono. 1981. Yogyakarta. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE UGM.
- Boediono, 1985. Yogyakarta. *"Ekonomi Moneter : Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5*. BPFE UGM.
- Chandler, L.V. 1989. Jakarta. *Ekonomi Uang Dan Bank*. Edisi Kesembilan, Bina Aksara.
- Daruningsih, Purbasari. 2007. Jakarta. *Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2006 Lebih Rendah*. www.elshinta.com/v2003a/read_news.htm?id=37399)
- Hakim, Abdul. Yogyakarta. 2002. *Ekonomi Pembangunan*. Ekonisia UII.
- Harrord and Domar. 2000. England. *Essay On The Theory Of Economics Growth*. Oxford University Press.
- Juoro, Umar. 2007. Jakarta. *Menarik Investasi*. (www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=5408&kat.id=15&katid1=&kat_id2=_33k)
- Kadin, 2006. Jakarta Selatan. *Laporan Ekonomi Bulanan; Edisi Januari*. (<http://www.Kadinindonesia.or.id/id/doc/LaporanEkonomiEdisiAgustus06.pdf>)
- Kadin, 2007. Jakarta Selatan. *Laporan Ekonomi Bulanan; Edisi Februari*. ([http://www.kadin_Indonesia.or.id/id/doc/LaporanEkonomiEdisiFebruari07 .pdf](http://www.kadin_Indonesia.or.id/id/doc/LaporanEkonomiEdisiFebruari07.pdf))
- _____. 2007. Jakarta. *Proyeksi Perekonomian Tahun 2008 Lebih Cerah*. (http://www.bappenas.go.id/.../proyeksi%20Perekonomian%20Tahun%202008%20Lebih%20Cerah.htm_18k).
- Kuncoro, Mudrajad. 1998. Jakarta. *Country Risk dan Berakhirnya Paceklik Investasi?* (http://www.mudrajad.com/upload/magazine_country-risk_berakhirnya-paceklik-investasi.pdf)
- Nasution, Anwar. 1991. Jakarta. *Tinjauan Ekonomi Atas Dampak Paket Deregulasi Tahun 1998 Pada Sistem Keuangan Indonesia*. Penerbit Gramedia.
- Propenas. 2001. Jakarta. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004*. Eko Jaya.
- Samuelson, Paul A dan Nordhaus, William. 1994. Jakarta. *Makro Ekonomi*. Terjemahan Erlangga
- Suara Pembaruan Daily. 2007. Jakarta. *Pertumbuhan Ekonomi Republik Indonesia Tertinggi di Asia Timur*. ([Suara Pembaruan.com/News/2007/04/05utama/ut.htm](http://SuaraPembaruan.com/News/2007/04/05utama/ut.htm))
- Sukirno, Sadono. 1985. Jakarta. *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*, LPFE - UI dan Bina Grafika.

- _____. 1994. Jakarta. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparmoko. M, 1998. Yogyakarta. *Pengantar Ekonomi Makro*. BPFE..
- Zamroni. 2007. Jakarta. *Investasi di Indonesia: Antara Realita dan Harapan*
(www.zamronisalim.com/bahasa/study-research/investasi-di-indonesia.html - 35k -)